

INOVASI PEMBELAJARAN “PROJECT CITIZEN”

Oleh :
Dasim Budimansyah*)

Abstrak

Artikel ini memperkenalkan satu inovasi pembelajaran yang dikenal dengan nama *Project Citizen*. Model yang diadaptasi dari *We The People: Project Citizen* ini digunakan untuk memotivasi dan memberdayakan para siswa dalam menggunakan hak dan tanggung jawab kewarganegaraan yang demokratis melalui penelitian yang intensif mengenai masalah kebijakan publik di sekolah atau di masyarakat tempat mereka berinteraksi. Bahan-bahan pelajarannya pun disusun untuk membantu para siswa belajar mengawasi dan mempengaruhi kebijakan publik, meningkatkan kecakapan yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan efektif serta memiliki rasa percaya diri dalam menggunakan hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. *Project Citizen* memberikan kesempatan kepada para siswa untuk ambil bagian dalam pemerintahan dan masyarakat sipil sambil mempraktikkan berpikir kritis, dialog, debat, negosiasi, kerja sama, kesantunan, toleransi, membuat keputusan, dan aksi warganegara (*civic action*) yakni melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara untuk kepentingan bersama

Kata kunci: *democracy, civil society, public policy, reflective inquiry.*

1. Pendahuluan

A. Darimana *Project Citizen* Berasal?

Model ini pertama kali digunakan di California pada tahun 1992 dan kemudian dikembangkan menjadi satu program nasional oleh Center For Civic Education (CCE) dan Konferensi Nasional Badan Pembuat Undang-Undang Negara pada tahun 1995. *Project Citizen* adalah satu *instructional treatment* yang berbasis masalah untuk mengembangkan pengetahuan, kecakapan, dan watak kewarganegaraan demokratis yang memungkinkan dan mendorong keikutsertaan dalam pemerintahan dan masyarakat sipil (*civil society*). Program tersebut mendorong para siswa untuk terlibat secara aktif dengan organisasi-organisasi pemerintah dan masyarakat sipil untuk memecahkan satu persoalan di sekolah atau di masyarakat dan untuk mengasah kecerdasan sosial dan intelektual yang penting bagi kewarganegaraan demokratis yang bertanggung jawab. Jadi, tujuan *Project Citizen* adalah untuk memotivasi dan memberdayakan para siswa dalam menggunakan hak dan tanggung jawab kewarganegaraan yang demokratis melalui penelitian yang intensif mengenai masalah kebijakan publik di sekolah atau di masyarakat tempat mereka berinteraksi. Bahan-bahan pelajarannya pun disusun untuk membantu para siswa belajar mengawasi dan mempengaruhi kebijakan publik, meningkatkan kecakapan yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan efektif serta memiliki rasa percaya diri dalam menggunakan hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. *Project Citizen* memberikan kesempatan kepada para siswa untuk ambil bagian dalam pemerintahan dan masyarakat sipil sambil mempraktikkan berpikir kritis, dialog, debat, negosiasi, kerja sama, kesantunan, toleransi, membuat keputusan, dan aksi warganegara (*civic action*) yakni melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara untuk kepentingan bersama (CCE, 1998:1; Budimansyah, 2008:1).

Meskipun dirancang untuk digunakan oleh para siswa sekolah menengah dalam bidang pelajaran **Civic and Government**, *Project Citizen* juga sudah diterapkan di tingkat sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas dalam bidang **Ilmu Sastra**, **Social Studies**, dan antarberbagai cabang ilmu pengetahuan yang dipelajari siswa pada semua tingkatan. Dengan jatah waktu pelajaran selama 50 menit, program tersebut diprioritaskan menjadi mata pelajaran dengan jangka waktu enam minggu yang digunakan untuk menambah mata pelajaran yang ada di dalam kerangka satu kurikulum yang standar. Tetapi di Latvia, program tersebut diterapkan sebagai satu kurikulum intensif satu minggu (tujuh hari penuh) dan di negara-negara bagian lainnya di Amerika Serikat sebagai satu mata pelajaran yang berdiri sendiri sepanjang semester.

Peran guru yang utama adalah sebagai instruktur atau fasilitator yang memberi petunjuk pada para siswa tentang sumber-sumber informasi yang baru, membantu mengadakan kontak-kontak, dan membekali para siswa dengan saran-saran bermanfaat lainnya pada waktu para siswa mengadakan penelitian. Bimbingan atau petunjuk guru menerangkan tiap tahap proses penelitian tersebut, memberikan banyak sumber tambahan (sebagai contoh, kiat-kiat memperoleh sumber informasi yang baik, pedoman untuk mengadakan satu simulasi (sidang dengar pendapat), dan para guru juga melengkapi para siswa dengan rubrik-rubrik evaluasi untuk menilai kinerja tulisan dan lisan mereka. Para guru juga memberikan panduan khusus kegiatan siswa untuk membantu mereka melewati tiap tahap dari program tersebut, kriteria penyelesaian tiap tugas, daftar istilah-istilah, dan lampiran-lampiran untuk membantu menemukan sumber-sumber yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah-masalah kebijakan publik secara mendalam.

Bagi banyak kelompok siswa, tahap pertama program *Project Citizen*, yaitu memilih masalah untuk diteliti, merupakan tahap tersulit (CCE, 1998: xvii). Oleh karena itu peran guru sebagai fasilitator hendaknya mampu menyadarkan mereka bahwa masalah-masalah tersebut banyak terdapat di sekitar kita. Mereka dapat diarahkan untuk memperhatikan berita yang dimuat pada surat kabar, ulasan berita di televisi, atau mengamati lingkungan masyarakat sekitar. Ketika kelompok-kelompok siswa telah menemukan sejumlah masalah yang potensial untuk dijadikan bahan kajian kelas, selanjutnya mereka harus meneliti pentingnya masalah-masalah tersebut dengan mewawancarai anggota masyarakat dan meninjau ulang sumber-sumber informasi dari media mengenai masalah tersebut (CCE, 1998:11-15). Jika kelompok siswa yakin telah memperoleh informasi yang cukup mengenai masalah-masalah yang sedang dibicarakan untuk membuat keputusan, maka para siswa tersebut dapat memutuskan masalah apa yang akan diteliti. Meskipun bukan merupakan bagian resmi dari kurikulum *Project Citizen*, banyak guru meminta pada para siswa membuat kriteria untuk memberikan penilaian masalah-masalah yang potensial (sebagai contoh, pentingnya masalah tersebut, kemungkinan dapat ditelitinya masalah tersebut).

Setelah memilih satu per-soalan penting, kelompok siswa tersebut dibagi menjadi tim-tim riset untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, seperti perpustakaan, koran, anggota masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga perwakilan rakyat, perwakilan pemerintah, dan sumber-sumber elektronik. Informasi dikumpulkan dengan berbagai cara, seperti *www (world wide web)* atau situs internet, telepon, wawancara perorangan, dan melalui surat. Hasil pekerjaan itu dituangkan dalam naskah siswa yang memperlihatkan bentuk-bentuk dokumentasi dari tiap sumber, yang disusun untuk mengarahkan analisis informasi yang diperoleh. Setelah itu, kelompok siswa tersebut kembali dibagi menjadi kelompok-kelompok belajar kooperatif untuk melaksanakan empat tahap penelitian dan keikutsertaan di dalam pro-ses pembuatan kebijakan publik, yaitu:

1. *Menerangkan masalah.* Kelompok ini bertanggung jawab untuk menjelaskan masalah yang telah dipilih oleh kelompok siswa untuk diteliti. Kelompok ini juga harus menjelaskan mengapa masalah tersebut penting dan mengapa pemerintah atau perwakilan pemerintah harus mampu menanganinya.
2. *Mengevaluasi kebijakan-kebijakan alternatif untuk memecahkan masalah.* Kelompok ini bertanggung jawab untuk mengembang-kan dan membenarkan kebijakan-kebijakan publik alternatif yang diuji dan dievaluasi oleh kelompok siswa.
3. *Membuat satu kebijakan publik yang akan didukung oleh kelompok siswa.* Kelompok ini bertanggung jawab mengembang-kan dan membenarkan kebijakan-kebijakan publik khusus yang oleh mayoritas kelompok siswa disetujui untuk didukung.
4. *Membuat satu rencana aksi untuk mendesak pemerintah menerima kebijakan kelompok siswa tersebut.* Kelompok ini bertanggung jawab membuat satu rencana aksi (*action plan*) yang menunjukkan bagaimana warga negara mempengaruhi pemerintah untuk menyetujui kebijakan yang didukung oleh kelompok siswa tersebut (CCE,1998:24-25).

Jika para siswa telah memilih satu kebijakan untuk memecahkan masalah, seluruh anggota kelompok siswa tersebut diminta untuk mempertimbangkan apakah kebijakan yang diusulkan tersebut mengganggu hak-hak individu seperti kebebasan berbicara, hak mendapat perlindungan atau pembelaan diri, privasi, atau perlindungan yang sama di bawah undang-undang. Para siswa diminta untuk mempertahankan konstitusionalitas kebijakan yang mereka usulkan secara hitam di atas putih.

Hasil kerja kelompok belajar kooperatif tersebut diperlihatkan dalam bentuk satu barang bukti portofolio tayangan (empat bagian) dan *binder* dokumentasi. Para siswa memasukkan pernyataan tertulis, *chart*, grafik, dan/atau karya seni asli pada tiap bagian portofolio dan memuat bukti penelitian mereka dalam *binder* dokumentasi. Naskah siswa tersebut menguraikan kriteria umum untuk semua bagian portofolio dan kriteria khusus serta saran-saran untuk tiap bagian tersendiri (CCE,1998:26-32).

Kegiatan puncak program tersebut adalah simulasi sidang dengar pendapat (*Show Case*) dimana para siswa menunjukkan pengetahuan mereka dengan memainkan peran sebagai saksi ahli. Mereka memberikan kesaksian mengenai portofolio yang mereka susun di depan anggota dewan juri, yang memainkan peran sebagai pembuat undang-undang negara. Format simulasi sidang dengar pendapat tersebut memberikan kesempatan pada para siswa untuk menunjukkan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang bagaimana kebijakan publik dirumuskan sambil membekali para guru dengan cara alternatif untuk menilai kinerja siswa. Selama *Show Case*, tiap kelompok dengan bagian portofolionya masing-masing mempersiapkan dan mempresentasikan satu pernyataan dalam waktu empat menit pada tiap bagian portofolio. Setelah tiap pernyataan pembuka, para juri yang merupakan anggota masyarakat memiliki waktu enam menit untuk bertanya kepada para siswa untuk tiap pertanyaan panel dan menilai mutu dari tiap kerja tim menurut rubrik evaluasi yang diberikan pada tiap juri. Sesuai dengan naskah siswa, terdapat empat tujuan mendasar dari simulasi dengar pendapat ini, yaitu:

1. Memberitahukan para hadirin akan pentingnya masalah yang teridentifikasi di masyarakat.
2. Menjelaskan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan alternatif sehingga hadirin dapat memahami kelebihan dan kekurangan dari tiap kebijakan alternatif tersebut.
3. Membahas pilihan kelompok siswa tersebut sebagai kebijakan yang "terbaik" untuk memecahkan masalah dan "mengusulkan" kebijakan itu. Mengeluarkan dan mendukung pendapat kelompok tersebut bahwa kebijakan yang diusulkan tidak melanggar Undang-Undang Dasar, hukum tata negara, atau undang-undang.
4. Menunjukkan bagaimana kelompok siswa tersebut mampu meraih dukungan untuk kebijakannya di masyarakat, seperti di badan legislatif dan eksekutif pada tingkat pemerintahan yang tepat (CCE,1998:33).

Di Amerika Serikat dan di beberapa negara lainnya di seluruh dunia, para guru dan siswa yang terlibat dalam *Project Citizen* didorong untuk ikut ambil bagian dalam *Show-Case* tingkat lokal, regional, negara bagian, dan nasional yang bersifat kompetitif. Meskipun bukan satu syarat untuk ambil bagian dalam program tersebut, kompetisi-kompetisi tersebut menjadi cara untuk memotivasi siswa belajar, memberikan penghargaan atas prestasi siswa, dan menarik minat anggota masyarakat dan lembaga-lembaga penyandang dana yang potensial. Di Indiana, sebagai contoh, terdapat tiga kompetisi regional (di Lafayette, Evansville, dan Indianapolis) dan satu kompetisi negara bagian (di Indianapolis) yang diselenggarakan secara rutin sebagai program tahunan selama enam bulan dalam musim semi. Beberapa guru yang menerapkan *Project Citizen* cenderung melakukan *Show Case* hanya di sekolah dan memilih untuk tidak ambil bagian dalam satu kompetisi. Banyak dari mereka itu memperlihatkan sikap acuh tak acuh secara umum mengenai kompetisi-kompetisi akademis, sedangkan yang lainnya merasa kesulitan memasukkan kompetisi tersebut ke dalam kurikulum yang sudah padat dan merasa keberatan sehingga dengan cepat beralih ke topik-topik dan soal-soal lainnya.

Keikutsertaan dalam program tersebut bersifat suka rela di Indiana dan di seluruh Amerika Serikat; *Project Citizen* merupakan satu kegiatan pembelajaran fakultatif di dalam kurikulum sekolah-sekolah di Latvia, Lithuania dan negara-negara pasca-komunis Eropa Tengah dan Timur. Kumpulan bahan-bahan gratis yang terbatas (kumpulan buku pelajaran siswa di kelas, bimbingan guru, dan piagam penghargaan bagi siswa) tersedia dan membantu mendorong keikutsertaan mereka. Tingkat profesionalisme guru sebelum program *Project Citizen* dilatihkan sangat beragam. Beberapa guru telah ikut ambil bagian dalam lokakarya-lokakarya singkat (dua jam sampai sehari penuh), sementara

yang lainnya telah ambil bagian pada “*summer institutes*” (diklat yang diadakan pada saat liburan musim panas) yang lebih ekstensif yang berlangsung sampai empat hari. Dalam lokakarya dan lembaga pembinaan profesionalisme guru yang lebih ekstensif, para guru secara khusus menjalani versi singkat dari program tersebut. Mereka memperlihatkan satu portofolio dan *binder* dokumentasi, dan mereka ikut ambil bagian dalam *Show Case*.

B. Bagaimana Project Citizen Menjadi Milik Dunia dan Berkembang di Indonesia?

Nama lengkap paket pembelajaran ini adalah “*We The People...Project Citizen*” yang merupakan model pembelajaran yang dirancang untuk memberikan pengalaman belajar kepada para peserta didik tentang langkah-langkah dan metode yang digunakan di dalam proses politik. Karena memang sifatnya yang generik dan universal, model ini telah diadopsi di berbagai negara di luar Amerika Serikat seperti Albania, Argentina, Bosnia Herzegovina, Brazil, Cina, Kolombia, Kroasia, Republik Ceko, Republik Dominika, Hongaria, Indonesia, Irlandia, Israel, Yordania, Kazakhstan, Kosovo, Latvia, Libanon, Lithuania, Macedonia, Meksiko, Mongolia, Nikaragua, Nigeria, Oman, Palestina, Polandia, Rumania, Rusia, Slovakia, dan Uruguay. Di masing-masing negara yang mengadopsi, paket belajar yang dikembangkan oleh CCE ini diterjemahkan ke dalam bahasa nasionalnya masing-masing dengan adaptasi sebagian dari isinya sesuai dengan konteks masing-masing negara tersebut. Seperti dilaporkan oleh masing-masing anggota delegasi negara tersebut dalam “*Summer Seminar International Civic Education Program* di Palermo, Italia, 17-22 Juni 1999”, paket tersebut ternyata bisa diterapkan dan mendapat sambutan yang luas baik dari dunia persekolahan maupun pemerintah masing-masing negara, dan pada masing-masing negara tersebut kini siap memasuki tahap diseminasi yang lebih luas lagi. Fenomena tersebut dapat dipahami karena memang sifat generik dari paket “*We the People... Project Citizen*” yang pada dasarnya dikembangkan dari model pendekatan berpikir kritis atau reflektif sebagaimana dirintis oleh John Dewey (1900) dengan paradigma “*How We Think*”-nya atau model “*Reflective Inquiry*”-nya Barr, dkk (1978).

Pendekatan pembelajaran yang disarankan untuk dikembangkan adalah yang berorientasi pada proses berpikir kritis dan pemecahan masalah atau “*critical thinking-oriented and problem solving-oriented model*”. Salah satu model pembelajaran yang kini secara internasional diterapkan secara adaptif adalah model “*We the People...Project Citizen*” (CCE:1992-2000). Model ini dikenal sebagai “*A portfolio-based civic education project*” yang dirancang untuk mempraktekkan salah satu hak warganegara, yakni “*...the right to try to influence the decision people in his/her government make about all of those problems*” (CCE:1998), dengan cara melibatkan peserta didik melalui suatu “praktik-belajar” yang secara prosedural menerapkan langkah-langkah sebagai berikut.

- a. *Identify a problem to study* (Mengenali masalah untuk dipelajari);
- b. *Gather Information* (Mengumpulkan informasi);
- c. *Examine Solution* (Menguji pemecahan);
- d. *Develop students' own public policy* (Mengembangkan kebijakan publik peserta didik sendiri);
- e. *Develop an Action Plan* (Mengembangkan rencana tindakan).

Seluruh kegiatan peserta didik dengan langkah-langkah tersebut diakhiri dengan penyajian hasil proyek dalam bentuk “Portfolio” di hadapan para pejabat publik terkait untuk mendapat tanggapan, dan bila perlu dijadikan masukan bagi pembuatan kebijakan publik di daerahnya. Hasilnya ternyata bukan saja peserta didik menjadi lebih peka dan tanggap terhadap masalah kebijakan publik tetapi lebih jauh temuan proyek peserta didik itu benar-benar diadopsi oleh pemerintah setempat sebagai bagian dari kebijakan publik di daerahnya. Hal ini terjadi di banyak negara seperti di beberapa negara bagian di Amerika Serikat, beberapa kota di Italia, Bosnia, Rusia, Nigeria, Mongolia, Croatia, Polandia, Ceko, Ukraina, Macedonia, Mesir, Turki, Irlandia, Canada, Slovenia, Rumania, Jerman, Philippina, Kazkistan, dan beberapa negara “*emerging democracies*” lainnya (CIVITAS:2000), temuan proyek peserta didik itu benar-benar diadopsi oleh pemerintah setempat sebagai bagian dari kebijakan publik di daerahnya. Dengan demikian, para guru dan peserta didik dapat melakukan refleksi atas manfaat nilai dan prinsip demokrasi dalam kehidupan di sekolah yang diintegrasikan dengan kehidupan di dalam masyarakatnya. Di situlah kelas pendidikan demokrasi benar-benar dikembangkan sebagai laboratorium demokrasi yang tidak dibatasi oleh empat dinding ruangan kelas.

Untuk Indonesia, model ini telah diadaptasi menjadi model “*Praktik-Belajar Kewarganegaraan...Kami Bangsa Indonesia*” (PKKBI) yang diujicobakan oleh Center For Indonesian Civic Education (CICED) bekerjasama dengan *Center for Civic Education (CCE)*, Calabasas, USA dan Kanwil Depdiknas Jawa Barat pada bulan Juli 2000-Januari 2001 di enam SMP Negeri di sekitar Bandung, Jawa Barat, yakni SMP Negeri 4, 13, dan 34 Bandung; SMP Negeri 1 Lembang; SMP Negeri 1 Cikeruh (sekarang SMP Negeri 1 Jatinangor); dan SMP Negeri 1 Tanjungsari Sumedang. Pada saat bersamaan, di lingkungan masyarakat sekolah dan masyarakat yang lebih luas seyogyanya, juga dikondisikan untuk menjadi “*spiral global classroom*” (CICED,1999a:7). Dengan demikian, kesenjangan yang melahirkan kontroversi atau paradoksal antara yang dipelajari di sekolah dengan yang sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan masyarakat secara sistematis dapat diminimumkan. Hal inilah yang ingin dijembatani oleh model “*We the People...Project Citizen*” atau “*Praktik Belajar Kewarganegaraan... Kami Bangsa Indonesia*”.

Kemudian PKKBI juga secara nasional dirintis penerapannya oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Proyek Pendidikan Kewarganegaraan dan Budi Pekerti di 70 SMP an 3 SMA yang tersebar di 15 propinsi tahun 2001-2002, dan melalui program kerjasama Depdiknas dengan Center for Civic Education Indonesia (CCEI) diujicobakan pada 250 SMP yang tersebar di 12 propinsi pada tahun 2002. Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun berikutnya, (2003-2006) kegiatan rintisan menjangkau 64 kabupaten/kota dengan cakupan 512 SD, 512 SMP, dan 512 SMA. Dengan demikian dalam kurun waktu 6 (enam) tahun, (2001-2006) rintisan telah menjangkau 1.786 sekolah (SD, SMP dan SMA). Terakhir model ini diujicobakan pada empat SMA Binaan LPM UPI yang bekerjasama dengan Yayasan Damandiri, yakni SMA Negeri 15 Bandung, SMA negeri 1 Lembang, SMA Bina Dharma 1 Bandung, dan SMA PGRI Lembang. Yang masih perlu digali adalah seberapa tinggi tingkat keberlanjutan dari rintisan tersebut.

Rintisan implementasi tersebut bertujuan untuk mendapatkan “*best practices*” atau praktek terbaik dari penerapan model di SMP dan SMA dengan cara mengkaji kelayakan pedagogis (*pedagogical applicability*) dari model tersebut dilihat dari penguasaan model oleh guru, dukungan sistemik dan managerial dari kepala sekolah, dan dinamika konteks

sosial-budaya setempat. Bertolak dari “best practices” tersebut diharapkan dapat dirancang lebih lanjut pengembangan dan penerapan secara meluas dari model pembelajaran itu dalam konteks upaya peningkatan kualitas Pendidikan Kewarga-negeraan di sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Budimansyah, D. (2008). *Inovasi Pembelajaran Project Citizen: Menyemai Warganegara Demokratis Konstitusional*, Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan SPS UPI.
- CCE. (1999). *Project Citizen Around The World*, Calabasas: Center Correspondent.
- CCE. (1999). *We the People...Project Citizen: Guidance for Profesional Development*, Calabasas: CCE.
- CCE (1994) *Civitas : National Standards for Civics and Government*, Calabasas : CCE
- CCE (1996) *Foundations of Democracy : Authority, Privacy, Responsibility, and Justice*, Calabasas : CCE
- CCE (1996) *Violence in the Schools : Developing Prevention Plans*, Calabasas : CCE
- CCE (1997a) *We the People : Student Text*, Calabasas : CCE
- CCE (1997b) *We the People : Teacher's Guide*, Calabasas : CCE
- CCE (1997c) *We the People : Teacher's Guide*, Calabasas : CCE
- CCE (1997d) *We the People : The Citizen and The Constitution*, Calabasas : CCE
- CCE (1997e) *Foundations of Democracy : Teacher's Guide*, Calabasas : CCE
- CCE (1998a) *We the People : Project Citizen, Teacher's Guide*, Calabasas : CCE
- CCE (1998b) *Drugs in the Schools : Preventing Substance Abuse*, Calabasas : CCE
- CCE (1998c) *We the People : Project Citizen*, Calabasas : CCE
- CCE (1998d) *Foundations of Democracy : Authority, Privacy, Responsibility, and Justice*, Calabasas : CCE
- CCE (1998e) *We the People : The Citizen and The Constitution*, Calabasas : CCE
- CICED (1999) *Democratic Citizens in a Civic Society : Report of the Conference on Civic Education for Civic Society*, Bandung : CICED
- CICED (1999a) *The Development of Concept and Content of Civic Education for Indonesian School : Workshop Report*, Bandung : CICED
- CICED (2000) *The Needs-Assessment for New Indonesian Civic Education, A National Survey Report*, Bandung : CICED
- CICED (2000) *The Needs-Assessment for New Indonesian Civic Education : A Seminar Report*, Bandung : CICED
- CICED (1999b) *Preliminary Findings National Survey A Needs-Assessment For New Indonesian Civic Education*, Bandung : CICED
- CICED (1999c) *Civic Education Classroom as a Laboratory for Democracy*, Bandung:CICED (Makalah).
- CICED (1999d) *Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Suatu Program Kurikuler*, Bandung: CICED (Makalah)
- CICED (1999e) *Profiling The Citizen of The Future and The Proficiencies Required for The New Age: An Indonesian Case*, Bangkok: UNESCO-ACEID (Makalah)
- CICED (1998) *Strategi Penyempurnaan Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Makalah)
- CICED (2000) *Teacher Education for Democratic Citizenship*, Penang: Asia-Pacific Civic Educators Consortium (APCEC)
- Richard G. Niemi dan Chris Chapman (1999). *Perkembangan Kewarganegaraan untuk Siswa Kelas 9—12 di Amerika Serikat*, Washington DC: Departemen Pendidikan Amerika Serikat.